# *Mata Kuliah : Diplomasi dan Negosiasi*

***Dosen : Andrias Darmayadi, M.Si***

**Jenis-jenis Diplomasi**

Selama ini, diplomasi telah banyak dilakukan dalam berbagai bentuk, berikut ini diantaranya:

## a. Pingpong Diplomasi

Diplomasi Ping Pong (China) merujuk ke pertukaran budaya pemain tenismeja Amerika Serikat dan Republik Rakyat China pada tahun 1970-an. Hal ini juga menandai mencairnya hubungan Amerika-China sebelum kunjungan Presiden Richard Nixon ke Beijing.

Pada 6 April 1971, Tim tenis meja Amerika Serikat sedang mengikuti kejuaraan dunia ke-31 di Jepang yang kemudian mereka menerima undangan untuk mengunjungi RRC dari tim China. Pada tanggal 12 April 1971 tim Amerika ini ditemani para kuli cetak menjadi warga Amerika pertama yang menjejakkan kak di Ibukota RRC sejak partai Komunis Mao berkuasa selama 22 tahun sejak tahun 1949. Pertemuan ini difasilitasi komite Nasional Hubungan USA-China.

Sesuai sejarah tenis meja Amerika yang ditulis oleh Tim Boggan yang pergi le China bersama tim tenis meja USA, 3 peristiwa yang secara terpisah atau gabungan yang menghasilkan undangan ini.[[1]](#footnote-1)

Pertama, Welshman H Evans, presiden TTF pada waktu itu, mengakui bahwa dia mengunjungi China sebelum kejuaraan dunia tenis meja ke-31 dan menyarankan kepada Menteri Olah Raga dan Perdana Menteri China Zhou Enlai, bahwa China harusnya berinisiatif untuk berhubungan dengan dunia melalui even olahraga internasional setelah revolusi kebudayaan.

Kedua, Leah “Nona Ping” Neuberger, warga negara Amerika yang menjuarai kejuaraan dunia ganda campuran dan 9 kali juara Amerika, sedang melancong yang bersamaan dengan tim tenis meja Kada yang sedang diundang ke negeri China. Sebagai bagian taktik diplomasi, China memberikan persetujuan aplikasi visa Leah Neuberger untuk bergabung dengan tim Amerika.

Ketiga, dan sangat mungkin jadi pencetus utama, terutama sekali dari sumber informasi China pertemuan dramatis yang tak terduga antara pemain flamboyant Amerika Glen Cowan dengan pemain China Zhuang

Zedong (juara dunia 3 kali: 1961,1963,1965) dan juara pada beberapa even kejuaraan tenis meja.

Ini terjadi di suatu sore Glen Cowan ketinggalan bis tim-nya di Nagoya ketika kejuaraan dunia tenis meja ke-31 setelah berlatih dilapangan. Cowan berlatih selama 15 menit dengan pemain China, Liang Geliang, kemudian official dari jepang datang ingin menutup area latihan karena waktunya telah habis.

Sia-sia saja Cowan mencari bis tim Amerika, pemain China melambai dan mengajaknya naik bis tim China. Sesaat setelah perbincangan tidak sengaja lewat penerjemah ke pemain China, Zhuang Zedong bangkit dari duduknya dan menyalaminya dan memberikan lukisan sutera bergambar gunung Huanghan, produk terkenal dari Huangzhou. Cowan ingin memberikan balasan tetapi yang ditemukannya dari tasnya Cuma sisir saka dan dia berkata “Ya Tuhan, saya tidak mungkin memberikan kamu sisir. Saya ingin dapat memberikan untukmu sesuatu yang lain tetapi saya tidak punya.”

Ketika mereka turun dari bis, sekumpulan fotografer politik dan wartawan sudah menunggunya. Glen Cowan akhirnya menemukan dan membeli T-Shirt berwarna merah, putih dan biru. Serta lencana bendera kedamaian dengan tulisan “Let it Be” (biarkanlah terjadi). Pada pertemuan yang lain di Zhuang Zedong, dia mempergunakan T-shirt tersebut ke Zhuang and menerimanya.

Zhuang kemudian ingat ketika Pemimpin China Mao Zedong bertemu dengan Edgar Snow di lapangan Tiananmen pada hari nasional 1970 dan Mao berkata kepada Snow bahwa China menaruh harapannya pada orang Amerika. Zhuang melihat tasnya dan pertama kali terlihat beberapa pin dan lencana dengan gambar wajah Mao, saputangan sutera dan kipas. Tapi dia merasa tidak cukup pantas sebagai cindera mata yang baik. Dia kahirnya mengambil lukisan gunung Huangshan dari bahan sutera.

Hari berikutnya, banyak Koran Jepang memuat foto Zhuang Zedong dan Glen Gowan . Baberapa hari kemudian Departemen Luar negeri China menerima laporan bahwa tim tenis meja Amerika ingin mendapatkan undangan untuk menginjungi China . Seperti biasa Departemen tersebut menolak, Zhou Enlai dan Mao Zedong juga setuju dengan keputusan itu. Sore harinya, entah bagaimana, Mao Zedong melihat foto Zhuang Zedong bersalaman dengan Glen Cowan. Hal ini merubah fikiran Mao dan ia memutuskan untuk mengundang tim tenis meja Amerika. Dilaporkan bahwa Mao Zedong berkata si Zhuang Zedong ini bukan hanya pemain tenis meja yang bagus tetapi juga ahli urusan luar negeri dan mempunyai pikiran politik.

Pada tanggal 10 April 1971, 9 pemain Amerika , 4 offisial dan 2 pasangan pemain menyebrangi jembatan dari Hongkong ke Daratan China dan menghabiskan waktu mereka dari tanggal 11-17 April 1971 bermain pertandingan eksibisi, tamasya ke Tembok China, Summer palace, menonton ballet dan sebagainya.

Pada Februari 1972, Richard Nixon melakukan kunjungan bersejarah ke China. Dua bulan setelah kunjungan Nixon, Zhuang Zedong mengunjungi Amerika sebagai ketua delegasi tenis meja China pada 12-30 April 1972. Juga dalam rencana perjalanan yang sama ke Kanada, Meksiko dan Peru.[[2]](#footnote-2)

Ternyata tenis meja bukan hanya meningkatkan kualitas hidup secara pribadi tapi juga perdamaian dunia.

Keberhasilan diplomasi pingpong ini akhirnya memicu negara lain untuk melakukan dan mengembangkan diplomasi olahraga. Contoh lain dari keberhasilan diplomasi olahraga ditunjukkan oleh diplomasi sepakbola Rusia dibawah kepemimpinan Presiden barunya , Dimitri Medvedev. Dalam rangka menurunkan sentiment negative Rusia terhadap Inggris sekaligus meningkatkan hubungan kedua negara, Medvedev mengizinkan sekitar 40 ribu penggemar Chelsea dan Menchester united dalam laga final Liga Champions di Rusia pada 21 Mei 2008. Mereka bebas memasuki bumi Rusia tanpa visa agar dapat menikmati final Liga Champions. Padahal, penggemar kedua klub ini (kaum hooligans) dikenal sangat brutal dan banyak ditolak masuk negara lain karena dicurigai hanya akan mengobarkan aksi kekerasan dalam setiap pertandingan. Tak hanya itu, Medvedev juga memerintahkan pihak berwenang menyiapkan seribu bus untuk mengangkut mereka. Sebuah tempat yang nyamanpun dibangun bagi para penggemar kedua klub dilapangan Merah yang tak jauh dari makam Lenin. Bahkan penyair tersohor Rusia, Alexander Pushkin yang mengenakan scarf MU lengkap dipajang dengan pajangan spanduk lainnya persis didepan patung Lenin.

Memang, cukup sulit mengukur tingkat keberhasilan dari aktivitas diplomasi olahraga. Meskipun demikian, diplomasi olahraga dapat menjadi altenatif yang efektif selain diplomasi konvensional dimeja perundingan. Diplomasi olahraga sebagai elemen dari diplomasi publik adakalanya dapat sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya khas seperti yang dilakukan oleh KBRI di Sudan dengan lagu-lagu Indonesia, eksebisi bulutangkis dan jajanan pasarnya. Menang-kalah terkadang tidak jadi masalah. Yang penting diplomasi tersebut mampu meredam konflik ketegangan serta membawa hubungan lebih erat. Di lapangan olahraga-lah kita semua dapat menikmati indahnya sportivitas. Tidak ada bom, tidak ada rudal, tidak ada pertarungan ideologis. Yang ada hanyalah indahnya hubungan antar umat manusia.

## *b. Open Diplomacy*

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, dalam fourteen-points speech yang dikemukakan oleh President AS, Woodrow Wilson, dimana point pertamanya menandakan era lahirnya diplomasi yang demokratis atau yang lebih dikenal dengan diplomasi terbuka (open diplomacy) atau diplomasi public (public diplomacy) serta satu gagasan yang tidak kalah pentingnya yaitu pembentukan organisasi-organisai internasional (LBB). Gagasan Wilson ini mempengaruhi praktik diplomasi pada tahun 1920-an. Tidak hanya Woodrow Wilson, ide tentang open diplomacy juga berkembang diantara para politikus AS lainnya yang percaya bahwa diplomasi tradisional yang sifatnya sangat rahsia dan tertutup mengandung ketidakjujuran, sehingga sangat sulit sekali mencari alasan utama mengapa meereka melakukan aktivitas diplomasi. Bahkan saat itu moralitas atau prinsip keadilan tidak dianggap sebagai elemen penting dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antar negara dan pemerintah dipandang sebagai tindakan amoral dan sebuah persaingan yang tidak sehat dalam upaya mereka membawa kepentingan nasional dalam sistem anarki. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan rahasia atau tertutup diatas, tidak hanya tertutup bagi lawan dan oposisi, tetapi juga bagi masyarakat dan parlemennya.[[3]](#footnote-3)

Gagasan utama dalam sistem diplomasi baru yang berkembang sejak abad ke-19 dan mencapai puncak peralihannya pada abad ke-20, salah satu tuntutan bahwa diplomasi harus dibuat lebih terbuka terhadap pengawasan dan pengendalian publik. Tuntutan ini lebih mengarah kepada penyediaan informasi mengenai perjanjian-perjanjian yang dicapai kepada masyarakat umum. Tuntutan akan diplomasi yang lebih terbuka memfokuskan diri kepada dua hal dari diplomasi tradisional yang dianggap problematik, yaitu kerahasiaan yang berlebihan dan fakta bahwa para diplomat biasanya berasal dari kelas sosial elit yang tertutup atau disebut juga aristokrasi.[[4]](#footnote-4)

Dari pandangan inilah, kemudian lahir dua implikasi praktis yang mungkin layak untuk digaris bawahi, khususnya dalam konteks pelaksanaan diplomasi.pertama, kelompok pemikir Kantian umumnya menyatakan bahwa diplomasi dilakukan untuk mengurangi dan bukan meningkatkan ketegangan. Oleh karenanya wajar saja jika kemudian kelompok ini menentang digunakannya *diplomacy by strength* dan *gun boat diplomacy*. Kedua kelompok ini juga menyatakan bahwa diplomasi terbuka *(open diplomacy)* merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan atas dasar moralitas yaitu memperkuat rasa persaudaraan sesama umat manusia. Kaum Kantian memandang diplomasi sebaliknya tidak dilaksanakan secara diam-diam (*quite diplomacy)* tetapi menyediakan ruang yang luas bagi public untuk memberikan masukan *(public view).* Untuk mencapai tujuan tersebut, penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas *(publicity)* dipandang menjadi syarat yang sangat penting untuk melaksanakan *open diplomacy.*

Maksud yang terkandung dalam pengertian open diplomacy bukan berarti bahwa semua hal yang berkaitan dengan perjanjian yang akan dilakukan harus diberitahukan kepada masyarakat diseluruh dunia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa open diplomacy merupakan kebalikan dari secret diplomacy yang mana isi dan keberadaan negosiasi dirahasiakan dari masyarakat. Open diplomacy terdiri dari perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan secara terbuka dan disertai informasi untuk diketahui oleh masyarakat. Tentunya, hal ini bertentangan dengan diplomasi sebelumnya yang bersifat rahasia dan penuh dengan problematick, dimana terjadi perjanjian –perjanjian ganda dan perjanjian-perjanjian rahasia yang justru menjadi penyebab utama perang bukan tercapainya perdamaian seperti *Skykes-Picot Agreement.[[5]](#footnote-5)*

Ada beberapa pakar hubungan internasional yang menyebutkan bahwa antara open diplomacy dan publik diplomacy merupakan dua jenis diplomasi dari kelompok yang berbeda, namun sepertinya lebih tepat bahwa open diplomacy merupakan bentuk diplomasi baru yang dipandang secara umum sebagai diplomasi yang melibatkan masyarakat umum, oleh karena itu tidak berlebihan jika ada yang berpendapat bahwa *public diplomacy* merupakan bagian dari *open diplomacy* namun dalam skala yang lebih luas *multifaced diplomacy*, yang mana isu yang dinegosiasikan tidak seputar *high politics* dan aktor yang menjalankannya pun hanya pemerintah sebagai wakil negara tetapi termasuk actor non-negara bahkan media massa. Mengapa dalam *open diplomacy*, peran serta masyarakat sangat diprioritaskan? karena pada kenyataannya, pemerintah tidak selalu dapat menjawab berbagai tantangan dalam isu-isu diplomasi yang kian hari kian kompleks, lebih dari itu pelaksanaan diplomasi yang dilakukan pemerintah sangatlah kaku (rigid, telalu formal) dan memakan biaya yang sangat tinggi. Melalui peningkatan aktivitas diplomasi tersebut pemerintah berharap bahwa upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada msyarakat internasional . disamping itu, pemerintahpun berharap bahwa keterlibatan masyarakat dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah sekaligus dapat memberikan masukan dan cara pandangan yang berbeda dalam melihat suatu negara melalui *understanding , informing, and influencing foreign audiences*. Dengan kata lain, jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme *government to government relations*, maka *open diplomacy* lebih ditekankan pada *government to people* atau bahkan *people to people relations.*

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam diplomasi:

* Agar masyarakat internasional mempunyai persepsi yang baik tentang suatu negara, sebagai landasan social bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas.
* Adanya pemahaman komunikasi yang baik dan saling pengertian serta mempererat hubungan antar aktor internasional sehingga dapat mengurangi atau menyelesaikan konflik.
* Mengurangi ketegangan, kemarahan, ketakutan dan salah persepsi.
* Menambah pengalaman dalam berinteraksi
* Mempengaruhi pola pikir dan tindakan pemerintah dengan menjelaskan akar permasalahan, perasaan, kebutuhan dan mengeksplorasi pilihan-pilihan diplomasi tanpa prasangka.
* Memberikan landasan bagi terselenggaranya negosiasi-negosiasi yang lebih formal serta merancang kebijakan pemerintah.[[6]](#footnote-6)

Aktivitas *open diplomacy* dapat melengkapi upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah. Dalam banyak hal diplomasi tradisional memiliki keterbatasan, akan tetapi keterbatasan itu dapat diimbangi oleh jalur *open diplomacy* melalui berbagai upaya yang fleksibel dan informal. Open *diplomacy* memberikan akses kepada masyarakat dalam menyikapi persoalan-persoalan politik luar negeri sehingga tidak lagi dibatasi oleh interpretasi yang diberikan oleh diplomat tradisional. Selain itu juga memungkinkan masyarakat baik secara individu maupun dalam kelompok epistemik yang dibentuk pemerintah untuk berperan dalam memberi masukan bagi kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri.

## *c. Summit Diplomacy*

Diplomasi tidak hanya dilakukan dengan cara bilateral, antara satu negara dengan negara lainnya.salah satu bentuk diplomasi, dimana para pemimpin negara bertemu dalam suatu konferensi atau pertemuan tingkat tinggi yaitu *summit diplomacy*. *Summit diplomacy* adalah suatu istilah yang pertama kali digunakan pada tahun 1950-an untuk menyebut negosiasi-negosiasi diantara para kepala negara dan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini dipandang sebagai sarana untuk melengkapi diplomasi tradisional yang dipandang kurang efektif. Sejak tahun 1960-an, *summit diplomacy* telah diterapkan kedalam berbagai pertemuan khusus diantara pemimpin negara, biasanya mengiringi negosiasi-negosiasi yang panjang dengan isi formal dan simbolik.[[7]](#footnote-7)

*Summit diplomacy* dapat memiliki arti penting karena hanya pemimpin tertinggi negaralah yang dapat menawarkan kompromi atau *trade offs* melewati batas-batas nasional dan dalam lingkup internasional serta untuk membuat komitmen-komitmen yang mengikat.[[8]](#footnote-8)contoh lain dari komunikasi langsung diantara para pemimpin tertinggi suatu negara adalah melalui *summit meeting* diantara *super powers* yang dipelopori oleh *Geneva summit* pada tahun 1955. Pada awalnya, *summit meeting* hanya memiliki nilai simbolis. Akan tetapi, pada tahun 1970-an *summit meetings* menjadi forum untuk merundingkan perjanjian-perjanjian *Tangiable* yang membantu mengurangi ketegangan Barat-Timur. Pada pertengahan tahun 80-an, serangkaian super power *summit meeting* memainkan peran yang signifikan dalam mengakhiri Perang Dingin.[[9]](#footnote-9)

Praktik konferensi Tingkat Tinggi *(Summitry)* dianggap sebagai praktik yang controversial namun tidak terhindarkan dalam perkembangan praktik diplomasi modern . istilah summit tidak memiliki makna politik atau diplomatik apapun hingga Winston Churchill memperkenalkannya sebagai jargon internsional. Pada tahun 1950-an, ia mulai menyebut pertemuan-pertemuan diantara pemimpin-pemimpin *great powers* sebagai *summit meeting* atau pertemuan tingkat tinggi (di Indonesia sering diterjemahkan sebagai konferensi Tingkat Tinggi/KTT). Selama perang Dunia II dan sesudahnya, pertemuan diantara para pemimpin tertinggi negara-negara pemenang perang menjadi medium andalan Churchill, meskipun hanya sedikit diantaranya yang mencapai kesuksesan diplomatik. Akan tetapi summit sebagai medium diplomasi bukanlah suatu yang begitu baru. 30 tahun sebelumnya Lyold George telah menyarankan pertemuan tingkat tinggi sebagai sarana terbaik menyelesaikan permasalahan - permasalahan internasional. Meskipun demikian, setelah tahun 1945, *Summit diplomacy* semakin popular dikalangan pemimpin negara –negara berkembang.

***Berbagai Sisi Pertemuan Tingkat Tinggi***

Pertemuan tingkat tinggi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. Pertemuan tinggi yang berseri paling sesuai untuk melakukan negosiasi. Kelebihan *summit* yang lain adalah kandungan agendanya yang luas sehingga dapat meliputi isu-isu yang kompleks.akan tetapi agar suatu *summit* berjalan dengan lancar, perlu diadakan tahap persiapan yang mendetail ditingkat yang lebih rendah oleh para ahli . meskipun demikian, hal tersebut tidak serta merta menjamin kesuksesan suatu pertemuan tingkat tinggi. Klaim yang menyatakan bahwa bahaya-bahaya yang biasanya diasosiasikan dengan *summit* telah menghilang seiring dengan instituisionalisasikan dengan hati-hati, pertemuan tingkat tinggi tidak selalu dapat mencapai tujuan-tujuan diplomasi yang seharusnya.[[10]](#footnote-10) . Terdapat berbagai jenis pertemuan tingkat tinggi sehingga sulit untuk dibuat generalisasi mengenainya. Terdapat perbedaan yang sangat besar misalnya, KTT Yalta diantara para pemimpin Sekutu pada tahun 1945 dan KTT Johannesburg pada tahun 2002 mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Keduanya terpisahkan hampir Selama 60 tahun dan memiliki sedikit persamaan, namun keduanya jelas merupakan pertemuan tingkat tinggi . Membedakan antara summit dan pertemuan tingkat tinggi lainnya tidak selalu mudah dalam media massa kini , banyak pertemuan internasional yang dianggap sebagai pertemuan tingkat tinggi. Membedakan antara *summit* dan pertemuan tingkat tinggi lainnya tidak mudah dalam media massa kini, banyak pertemuan internasional yang dianggap sebagai pertemuan tingkat tinggi, diantaranya adalah pertemuan menteri-menteri Keuangan WTO atau pertemuan global kelompok-kelompok penekanan transnasional. Pertemuan menteri-menteri luar negeri bukanlah pertemuan tingkat tinggi meskipun pertemuan tersebut sangat penting bagi persiapan suatu pertemuan tingkat tinggi seperti pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa yang menjadi jalan pembukaan terselenggaranya pertemun tingkat tinggi *(summit)* lebih sesuai diterapkan pada pertemuan antara kepala pemerintahan suatu negara, pemimpin politik, atau perwakilan tinggi dari suatu organisasi internasional.

Perlu diingat bahwa pertemuan internasional dapat memiliki beberapa tujuan. Pertemuan seremonial serta kunjungan kenegaraan bahkan menghadiri upacara kematian kenegaraan dapat memiliki fungsi diplomatik dan dapat menjadi alat yang cukup efektif untuk menciptakan komunikasi nonverbal atau mengirimkan sinyal-sinyal diplomatik.[[11]](#footnote-11) Akan tetapi, kunjungan kenegaraan dengan pimpinan disalah satu saja tidak dapat dikatakan sebagai *summit* . Pertemuan tingkat tinggi harus dibedakan dari diplomasi personal antara pemimpin politik yang berbentuk korespondensi, percakapan telepon, atau percakapan langsung dengan menggunakan konferensi video (*video conferrence).* Sebuah konferensi tingkat tinggi memerlukan suatu persetujuan mengenai waktu serta tempat pelaksanaan yang kadang-kadang kontroversial berkaitan dengan keamanan atau makna simbolisnya. Sebelum era modern, pertimbangan keamanan sering dikaitkan dengan pemilihan tempat diselenggarakannya pertemuan tingkat tinggi, contohnya adalah pertemuan raja-raja abad pertengahan disebuah rakit ditengah sungai untuk mencegah mereka melakuka hal-hal yang membahayakan fisik. Pada abad ke 20, pemilihan tempat penyelenggaraan pertemuan tingkat tingggi masih merupakan suatu hambatan dalam menyusun pertemuan para pemimpin politik seperti yang terjadi pada awal Perang Dingin dimana Stalin mengajak para sekutunya untuk bertemu diwilayah Uni Soviet hingga empat kali, yaitu dalam pertemuan Teheran 1943, pertemuan Moskow 1944, pertemuan Yalta dan Postdam pada tahun 1945. Pada masa pasca Perang Dingin, bahkan hingga masa pasca peristiwa 11 September, isu mengenai pemilihan tempat penyelenggaraabn pertemuan memasuki babak baru. Pertimbangan keamanan yang semula berfokus pada ancaman yang datang dari para anggota peserta pertemuan kini bergeser pada potensi ancaman dari orang-orang diluar pertemuan seperti protes oleh LSM internasional maupun lokal hingga ancaman terorisme . pertemuan-pertemuan tingkat tinggi pada umumnya kini diselenggarakan dibawah pengawasan militer yang ketat.

Pertemuan tingkat tinggi bukan merupakan suatu peristiwa yang tertutup, sebagaimana yang dikemukakan oleh Morgenthau bahwa pertemuan tingkat tinggi merupakan pendukung prosedur diplomasi yang umum. Pertemuan tingkat tinggi dapat menjadi alat untuk mempercepat proses diplomasi.

Kini dengan adanya kepedulian terhadap kesaling terhubungan politik global dalam segala tingkat serta kemunculan isu-isu nonteritorial seperti isu lingkungan, migrasi, AIDS, serta kejahatan internsional, bukan hanya sistem internasional yang berubah saja yang berdampak pada penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi dilaksanakan sama pentingnya pada masa pasca-Perang Dingin para pemimpin politik kini lebih peduli terhadap para konstitusi didalam masyarakat sipil di negaranya dan mencoba agar warga negara semakin dekat dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri. Hal yang lain adalah meningkatnya pengakuan bahwa organisai-organisasi non-pemerintah serta aktor-aktor non-negara memiliki peran yang tidak dapat dipungkiri dalam dialog internasional dimasa depan. Dunia tempat diselenggarakannya pertemuan tingkat tinggi tidak lagi bersifat bilateral maupun multilateral, namun lebih bersifat polilateral dengan beragam actor pemerintah dan non pemerintah.

***Masa Kejayaan Pertemuan Tingkat Tinggi***

Pertemuan tingkat tinggi telah ada sebelum era modern. Meluasnya kunjungan diplomatik dan munculnya duta-duta besar permanen, pada awalnya disemenanjung Italia pada abad ke-15, menyediakan alternative disamping pertemuan-pertemuan langsung diantara raja-raja. Meningkatnya peran duta besar memperkuat kecenderungan dilakukannya komunikasi secara tidak langsung dan negosiasi yang didelegasikan diawal Eropa modern. Dialog diplomatik secara bertahap menjadi semakin profesional dan terinstitusionalisasikan dengan didirikannya kementerian-kementrian luar negeri, pertama-tama di Perancis dan selanjutnya di setiap ibu kota dari para pemain kunci dalam sistem diplomasi Eropa. Pertemuan-pertemuan tingkat tinggi terus berlanjut meskipun diplomasi profesional telah berkembang, meskipun sering mendapat kritik dari para professional.

Walaupun berakar pada masa lampau, pertemuan tingkat tinggi modern sebagai sebuah fenomena yang terinstitusionalisasi adalah fenomena pertengahan abad ke-20. Sebelum Perang Dunia II, pertemuan tingkat tinggi merupakan sesuatu yang langka dalam perpolitikan internasional hingga akhirnya pada 1919, Presiden Amerika Serikat turut serta untuk pertama kalinya dalam pertemuan langsung dengan salah satu realisasinya. Pertemuan tingkat tinggi mulai berkembang pesat dengan dukungan perkembangan politik serta kemajuan penerbangan sipil pasca-Perang. Multilateralisasi politik pasca-perang memberikan intensif bagi perkembangan pertemuan tingkat tinggi yang bersifat multilateral meskipun memerlukan lebih dari dua puluh tahun untuk memantapkan proses ini.[[12]](#footnote-12)

Pada tahun 1940 dan 1950-an, terjadi beberapa pertemuan tingkat tinggi yang dramatis, namun menteri-menteri luar negeri lebih banyak bertemu dibandingkan para petingginya. Presiden-presiden AS tidak terlibat secara serius dalam pertemuan tingkat tinggi hingga tahun 60-an, namun menteri luar negerinya terlibat secara aktif dalam *shuttle diplomacy* sebagai suatu aktivitas yang rutin pada dekade sebelumnya meskipun istilah tersebut baru ada pada saat Henry Kissinger menyebutkannya pada tahun 70-an). Di Eropa, kedekatan antara ibu kota negara –negaranya memungkinkan terjadinya kontak personal dalam frekuensi yang tinggi, namun pertemuan tingkat tinggi’ pada tahun 60-an adalah pertemuan kepala-kepala negara-negara persemakmuran. Pertemuan tingkat tinggi multilateral atau *multilateral summit* tidak menjadi sesuatu yang rutin dilakukan hingga tahun 70-an.

Disamping terjadinya revolusi teknologi dan kemunculan serta pertumbuhan institusi – institusi multilateral, terdapat empat faktor lain yang membuat pertemuan tingkat tinggi internsional menjadi karakteristik permanen dalam bidang diplomasi yaitu;[[13]](#footnote-13)

1. Selama dan segera setelah Perang Dunia II, pertemuan tingkat tinggi dipandang oleh publik sebagai forum terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelik mengenai perang dan damai dan pembentukan kembali aliansi-aliansi dalam sistem internasional yang berkembang menjadi bipolar. Pertemuan-pertemuan tingkat tinggi seperti antara Roosevelt, Stalin dan Churchill berdampak pada meningkatnya ekspektasi mesyarakat bahwa *summit diplomacy* dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara mereka yang paling kompleks.
2. Meningkatnya sentralisasi pembuatan kebijakan luar negeri di Barat. Negara-negara demokratis di Barat semakin memusatkan pembuatan kebijakan luar negerinya ditangan kepala negara atau pemerintah sebagaimana dinegara-negara non-demokratis. Kebijakan luar negeri pada saat ini tidak dapat dibayangkan tanpa peran sentral para Perdana Menteri , misalnya dalam hubungan intra-Eropa, meskipun derajatnya masih rendah pada dekade –dekade awal setelah 1945 . Akan tetapi terlihatnya para pemimpin dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi menjadi kamuflase bagi meningkatnya pengaruh para diplomat profesional dan para ahli dalam keluaran-keluaran suatu pertemuan tingkat tinggi. Meskipun demikian, praktik *summit* cenderung memperkuat kendali kepala tingkat tinggi . meskipun demikian, praktik summit cenderung memperkuat kendali kepala eksekutif terhadap kebijakan luar negeri.
3. Berkurangnya ketegangan internasional setelah Perang Dingin, terutama di Eropa, sehingga lebih kondusif bagi pelaksanaan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi. Selain itu, terdapat urgensi mengenai berbagai permasalahan domestik dan permasalahan yang melintasi batas-batas negara, termasuk keresahan sosial, dislokasi ekonomi, dan degradasi lingkungan dalam periode kekacauan dalam administrasi publik., Para pemimpin terdorong untuk mencoba merekstrukturisasi arsitektur internasional dikawasan mereka, yang berkunjung pada berubahnya pola-pola interdependensi dan meningkatnya diplomasi regional. Sebelum tahun 1990-an, diplomasi regional telah menjadi karakteristik utama diluar Eropa seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kerjasama perdagangan di antara negara-negara selatan. Di Amerika Latin dan Amerika Tengah, pertemuan-pertemuan tingkat tinggi meningkat sebagai dampak dari pembentukan pengelompokkan – pengelompokkan regional seperti G-3,MERCOSUR, *The Carribean Community* (CARICOM), *The North American Free Trade Agreement* (NAFTA), dan the Rio Group.
4. Pentingnya media dan opini publik dalam urusan-urusan internasional menjadi intensif bagi para pemimpin untuk semakin memperlihatkan diri di depan konstituennya sebagai bagian dari upaya propaganda. Selain itu, diplomasi pada tingkat tertinggi ini semakin dipolitisasi dimana parlemen menginginkan informasi mengenai kebijakan luar negeri secara rinci.
5. Masa kejayaan pertemuan tingkat tinggi modern dapat dibagi kedalam dua tahap yang masing-masing terdiri dari 30 tahun. Public secara luas baru menyadari summit sebagai fenomena yang familiar setelah Perang Dunia II. Pertemuan –pertemuan bilateral atau trilateral menjadi ciri khas *summit* pada masa awal Perang Dingin, dan pertemuan antara superpower menjadi karakteristik summit pasca-perang . Pada awal tahun 70-an meningkatnya jumlah badan-badan multilateral meningkatkan pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi multilateral seperti pertemuan G-8 dan Dewan Eropa. Dalam 30 tahun terakhir abad ke -20, meningkatnya pertemuan tingkat tinggi untuk berbagai tujuan menjadikan summit sebagai bentuk diplomasi yang paling terlihat dan diplomasi yang memiliki banyak variasi bentuk.

Sebelum tahun 1970-an, sebagian besar negosiasi internasionaal dilakukan oleh para diplomat atau menteri luar negeri. Akan tetapi, kenyataan yang ada sekarang sangat berbeda dimana para pemimpin politik internasional. Summit pun dapat menjadi cara untuk menaikkan citra publik suatu organisasi internasional, sebagaimana yang dilakukan oleh *The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).* Akan tetapi, hal tersebut justru dapat menjadi boomerang dan memperlihatkan kelemahan organisasi internasional itu sendiri, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pertemuan para kepala negara dalam *The South Asian Association of Regional Cooperaation* (SAARC).

Dalam teori negosiasi adalah inti dari pertemuan tingkat tinggi. Akan tetapi prakteknya, banyak pertemuan antar kepala negara atau pemerintahan yang tidak lebih dari sekadar pertemuan informal atau seremonial.

Terlepas dari kelebihan-kelebihannya, *summit diplomacy* memiliki kelamahan-kelemahan diantaranya adalah terkurasnya energy para pemimpin karena terlalu banyak menghadiri pertemuan (*summit fatigue)* dan potensi berkurangnya dukungan domestik ketika sang pemimpin sering berada diluar negeri. Akan tetapi, ketidakhadiran pemimpin dapat menjadi sinyal diplomatik yang kuat, sebagaimana ditunjukkan dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi mengenai isu-isu Timur tengah. Oleh karena itu, pilihan untuk tidak menghadiri suatu pertemuan tingkat tinggi dapat merusak citra seoarang pemimpin negara dan negara yang bersangkutan . Kelemahan yang kedua adalah tingginya biaya untuk mengadakan suatu pertemuan tingkat tinggi dan lamanya waktu yang harus dihabiskan untuk mempersiapkannya, terutama pertemuan tingkat tinggi multilateral.[[14]](#footnote-14)

Meskipun memiliki kelemahan-kelemahan, pertemuan-pertemuan para pemimpin tinggi negara-negara tampaknya akan terus berlanjut, misalnya dalam NATO, di Amerika Latin, dan Asia. Salah satu kunci dalam memahami berubahnya wajah diplomasi dalam tingkat tertinggi adalah meluasnya agenda pertemuan tingkat tinggi kontemporer dengan isu-isu yang semakin bervariasi. Disamping isu-isu tradisional seperti perang, damai dan manajemn makro ekonomi, terdapat pula isu-isu lain seperti kualitas daging, imigrasi illegal dan polusi udara yang tidak berhasil diselesaikan dalam pertemuan yang lebih rendah.[[15]](#footnote-15)

Didalam pertemuan tingkat tinggi, seringkali terdapat lebih banyak aktor non-pemerintah, seperti dalam kasus pertemuan tingkat tinggi mengenai pembangunan yang berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002. Pertemuan – pertemuan tingkat tinggi dimasa yang akan datang diprediksikan menjadi tempat dimana para pemimpin berupaya memenuhi harapan dan kepentingan – kepentingan publik, bukan hanya untuk bertemu dan menjaga prestise. Hal ini menandakan semakin matangnya praktik *summit diplomacy.*

1. http://tiarrahman.multiply.com/journal/item/139 [↑](#footnote-ref-1)
2. http;//ti4r.blogd.friendster.com/tiar\_rahman/2007/06/diplomasi\_pingp.html [↑](#footnote-ref-2)
3. http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/tract1.htm [↑](#footnote-ref-3)
4. Brian White,”Diplomacy”,dalam John Baylis, The Globalization of World Politics,(Oxford:Oxford University Press,2001), hal.321 [↑](#footnote-ref-4)
5. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00D14FE3B5D147A93C2AB178AD85F4D8185F9 [↑](#footnote-ref-5)
6. http://lacapitale.wordpress.com/2008/04/19/diplomasi-publik/ [↑](#footnote-ref-6)
7. http://encyclopedia.jrank.org/Cambridge/entries/060 [↑](#footnote-ref-7)
8. JohnKirton,”Contemporary Concert Diplomacy:The Seven-Power Summit and The Management of International Order”, http://www.g7.utoronto.ca/scholah/kirton198901/kcon1.htm [↑](#footnote-ref-8)
9. Brian White,”Diplomacy”,dalam John Baylis, The Globalization of World Politics,(Oxford University Press,2001),h.322. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jan Mellisen,Summit Diplomacy Coming of Age”,Netherlands Institute of Internasional Relations ‘Clingendael”. [↑](#footnote-ref-10)
11. Erik Goldstein, The Politics of State Visits,DSP Discussion Papers no. 26, Centre for Study of Diplomacy (Leicester),1997;dan Jan Mellissen,”Diplomatie na de dood: De Begrafenis van Rabin als geimproviseerde politieke top’, international Spectator, 50:1.hal.3-7 [↑](#footnote-ref-11)
12. Jan Melissen, Summit Diplomacy Coming of Age”, Netherlands Institute of International of Internastional Relations ‘Clingendae” [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid [↑](#footnote-ref-15)